

INOVASI PENDAMPING SEKOLAH LAPANG DALAM MEWUJUDKAN DESA INKLUSIF

Tri Asmiyanto¹, Sugiyanto²

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD^{1,2}

e-mail: triasmygk@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran inovasi, strategi fasilitasi, dan tantangan multidimensi pendamping Sekolah Lapang Desa Inklusif (SLDI) dalam mendorong penerapan prinsip *No One Left Behind* (NOLB) di tingkat desa. Studi ini dilakukan di Kalurahan Ngipak dan Petir, Kabupaten Gunungkidul, yang memiliki karakteristik sosial-geografis kontras; Kalurahan Petir menghadapi kemiskinan struktural dengan dominasi petani penggarap dan banyak keluarga ODGJ, sedangkan Kalurahan Ngipak memiliki proporsi tinggi lanjut usia dan perempuan kepala keluarga dengan tantangan data kelompok rentan yang terbatas. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan pendamping menjalankan peran melampaui fungsi administratif; mereka bertindak sebagai agen perubahan akar rumput dengan inovasi inklusif berbasis pengetahuan lokal dan praktik budaya. Inovasi tersebut meliputi dimensi administratif (penyederhanaan prosedur kelompok rentan), sosial (pembentukan forum disabilitas), pedagogis (pembelajaran berbasis praktik lokal), ekonomi (penguatan usaha keluarga ODGJ), dan kelembagaan (pembentukan pengurus sekolah lapang melalui SK Lurah). Strategi pemberdayaan bersifat relasional, adaptif, dan transformatif, tekanan pembangunan kepercayaan, ruang aman partisipatif, kolaborasi lintas sektor, serta pengarusutamaan nilai inklusi dalam tata kelola desa. Namun, pendamping menangani tantangan struktural (minimnya dana fleksibel, lemahnya dukungan kelembagaan), kultural (stigma eksklusif sosial), dan teknis (akses digital, keterbatasan data dan infrastruktur). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan desa inklusi memerlukan fasilitasi sosial berkelanjutan, pendekatan humanistik, dan dukungan sistemik, di mana pendamping SLDI berhasil menerjemahkan prinsip NOLB dari wacana menjadi tindakan nyata dan bermakna pada tingkat desa.

Kata kunci: *inovasi sosial, strategi pemberdayaan, desa inklusi*

ABSTRACT

This study examines the role of innovation and facilitation strategies in overcoming multidimensional challenges to implement the No One Left Behind (NOLB) principle at the village level through the School of Inclusive Village program. The study was conducted in the villages of Ngipak and Petir in the Gunungkidul Regency, which have contrasting social and geographical characteristics. Petir faces structural poverty, with many tenant farmers and families experiencing psychosocial issues. Ngipak, on the other hand, has a high proportion of elderly individuals and single mothers, but limited data on vulnerable groups. A qualitative case study approach was used to collect data through in-depth interviews, participatory observation, and document review. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The study's results show that mentors play a role that extends beyond administrative functions. They act as grassroots agents of change, promoting inclusive innovations based on local knowledge and cultural practices. These innovations include administrative (simplifying procedures for vulnerable groups), social (forming a disability forum), pedagogical (practice-based learning), economic (strengthening family businesses for psychosocially vulnerable

families), and institutional (forming a school field management committee through a Head of Village decision). The empowerment strategy is relational, adaptive, and transformative, emphasizing trust-building, safe participatory spaces, cross-sectoral collaboration, and promoting inclusion values in village governance. However, the mentors addressed structural challenges (limited flexible funding and weak institutional support), cultural challenges (social exclusion and stigma), and technical challenges (limited digital access and infrastructure). This study concludes that inclusive village development requires continuous social facilitation, a humanistic approach, and systemic support. The School of Inclusive Village Mentors successfully implemented the No One Left Behind principle, turning it into meaningful action at the village level.

Keywords: *social innovation, empowerment strategy, inclusive village*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia menempatkan desa pada posisi yang sangat strategis, sebuah pergeseran paradigma yang dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini secara fundamental mengubah pandangan terhadap desa, dari yang semula hanya sebagai objek pembangunan menjadi subjek yang memiliki kewenangan otonom untuk secara mandiri mengelola potensi sumber daya dan memajukan kesejahteraan warganya (Kemendagri, 2020). Visi ideal ini sejalan dengan komitmen global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang mengusung prinsip utama *No One Left Behind*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap proses pembangunan harus bersifat inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, terutama mereka yang paling rentan dan terpinggirkan (UN DESA, 2016).

Meskipun terdapat landasan hukum dan komitmen global yang kuat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa desa-desa di Indonesia masih menghadapi serangkaian tantangan yang bersifat multidimensional. Banyak desa yang masih berjuang untuk keluar dari jerat kemiskinan, mengatasi kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan, serta menghadapi keterbatasan dalam layanan kesehatan yang memadai. Lebih dari itu, permasalahan lemahnya inklusi sosial masih menjadi isu yang persisten, di mana kelompok-kelompok rentan sering kali belum sepenuhnya terlibat dan mendapatkan manfaat dari proses pembangunan (Bappenas, 2022; UNDP Indonesia, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya sebuah perjuangan yang berkelanjutan untuk menerjemahkan visi ideal pembangunan inklusif ke dalam praktik nyata di tingkat desa.

Salah satu wilayah yang secara nyata merefleksikan tantangan pembangunan ini adalah Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Data statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan di wilayah ini mencapai 14,50%, sebuah angka yang secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi DIY yang berada di angka 11,91% (BPS Gunungkidul, 2023). Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gunungkidul yang berada pada angka 71,23 juga mengindikasikan masih adanya pencapaian yang rendah dalam tiga dimensi fundamental, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Kondisi ini diperparah oleh rasio dokter umum yang hanya 1 banding 5.000 penduduk, sangat jauh dari standar ideal WHO yaitu 1 banding 1.000 (Harian Jogja, 2024).

Permasalahan pembangunan di Gunungkidul menjadi semakin kompleks dengan adanya data mengenai kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 6.286 penyandang disabilitas di wilayah ini, sebuah angka yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 6.019 orang, dengan mayoritas di antaranya adalah penyandang disabilitas fisik (Harian Jogja, 2022, 2024). Peningkatan jumlah ini menandakan adanya kebutuhan yang semakin mendesak akan layanan dan

infrastruktur yang lebih inklusif. Kehadiran populasi rentan yang signifikan di tengah kondisi kemiskinan dan keterbatasan akses layanan dasar menciptakan sebuah tantangan berlapis yang memerlukan solusi yang komprehensif dan terarah (Purnomo et al., 2021; Tsabita & Sugandi, 2022).

Tantangan inklusi sosial ini terlihat semakin jelas ketika kita menelisik data di tingkat desa. Di Kalurahan Ngipak, misalnya, sebanyak 25% warga dilaporkan belum atau tidak pernah bersekolah, dan terdapat 18 balita yang mengalami gizi buruk. Tingkat kemiskinan di desa ini sangat tinggi, di mana 69% kepala keluarga tergolong miskin (Profil Kalurahan Ngipak, 2024). Sementara itu, di Kalurahan Petir, tantangan demografis muncul dengan tingginya proporsi penduduk lansia yang mencapai 28,9%. Di desa ini, sebanyak 68% kepala keluarga juga masih tergolong miskin atau pra-sejahtera, dan mayoritas perempuan yang bekerja di sektor pertanian belum sepenuhnya diakui secara formal (Profil Kalurahan Petir, 2024).

Data-data tersebut secara gamblang menunjukkan adanya sebuah kesenjangan yang mendalam antara idealitas pembangunan inklusif dengan realitas di lapangan. Prinsip *No One Left Behind* yang menjadi cita-cita bersama ternyata masih terhalang oleh berbagai kesenjangan struktural dan kultural yang secara sistematis mengecualikan kelompok-kelompok rentan. Penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan warga miskin sering kali menjadi kelompok yang paling tertinggal. Salah satu akar masalah yang paling mendasar adalah lemahnya sistem pendataan inklusi, di mana ketiadaan data yang lengkap mengenai kelompok rentan membuat mereka seolah tidak terlihat dalam perencanaan program pembangunan (Lekobane & Ton, 2024; Muryani & Sugiyanto, 2025; Setyawan & Sumarto, 2025; Srivastava, 2017; Widayanti et al., 2025).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, muncul sebuah aktor strategis yang hadir sebagai jawaban, yaitu para Pendamping Sekolah Lapang Desa Inklusif (SLDI). Para pendamping ini tidak hanya berperan sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial di tingkat akar rumput. Mereka bertugas untuk merancang dan mengimplementasikan berbagai inovasi sosial dan strategi pemberdayaan yang berbasis pada potensi dan pengetahuan lokal. Dalam perannya, mereka diharapkan mampu menjadi jembatan yang menghubungkan antara kebutuhan kelompok rentan dengan sumber daya yang tersedia, serta memfasilitasi solusi yang bersifat kontekstual dan berkelanjutan (Mulgan, 2006; Van de Ven, 2022).

Meskipun praktik inovasi sosial di pedesaan Indonesia telah banyak terjadi, namun kajian yang secara spesifik meneliti praktik-praktik tersebut dalam konteks desa inklusi yang secara eksplisit mengadopsi prinsip *No One Left Behind* masih sangat jarang ditemukan. Nilai kebaruan atau inovasi dari penelitian ini terletak pada upayanya untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk inovasi sosial yang dilakukan oleh para pendamping SLDI dalam mewujudkan desa inklusif. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan mengkaji strategi pendampingan yang mereka gunakan untuk menjangkau kelompok rentan serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip *No One Left Behind* di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai sebuah studi kasus kualitatif untuk memperoleh pemahaman holistik mengenai model-model inovatif dan taktik pendampingan dalam program Sekolah Lapang Desa Inklusif (SLDI). Lokasi penelitian ditetapkan di dua wilayah, yaitu Kalurahan Ngipak dan Kalurahan Petir di Kabupaten Gunungkidul, yang dipilih berdasarkan perbedaan karakteristik kerentanan sosialnya. Partisipan penelitian direkrut melalui teknik *purposive sampling* untuk memastikan cakupan data yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan. Informan kunci terdiri dari para pendamping SLDI, lurah dan

perangkat desa, serta perwakilan dari kelompok-kelompok rentan yang menjadi sasaran program, termasuk perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Keterlibatan beragam subjek ini bertujuan untuk menangkap dinamika implementasi program dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

Akuisisi data penelitian dilakukan dengan mengintegrasikan sumber primer dan sekunder melalui tiga teknik utama. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan seluruh kelompok informan menggunakan panduan semi-terstruktur untuk mengeksplorasi bentuk inovasi, strategi, dan tantangan pendampingan. Selain itu, peneliti menerapkan observasi partisipatif dengan terlibat langsung dalam kegiatan sekolah lapang dan proses pemberdayaan untuk mengamati dinamika di lapangan secara otentik. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari telaah dokumen-dokumen relevan seperti profil desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan laporan program SLDI. Instrumen pendukung yang digunakan meliputi catatan lapangan, perekam audio, dan matriks analisis dokumen untuk memastikan data terkumpul secara sistematis dan terstruktur.

Interpretasi terhadap data yang terkumpul dilakukan menggunakan model analisis interaktif. Proses ini mencakup tiga alur kegiatan simultan: reduksi data untuk menyeleksi dan mengorganisir informasi sesuai fokus, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara berulang. Untuk menjamin keabsahan temuan, diterapkan prosedur validitas yang ketat. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pendamping, aparat desa, dan kelompok rentan. Triangulasi metode diterapkan dengan memverifikasi silang temuan dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Di samping itu, dilaksanakan pula proses *member check*, di mana peneliti mengonfirmasi kembali interpretasi awal kepada informan kunci untuk memastikan akurasi dan kredibilitas hasil akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menganalisis peran inovasi, strategi pemberdayaan, dan tantangan yang dihadapi pendamping Sekolah Lapang Desa Inklusif (SLDI) di Kalurahan Ngipak dan Petir, Kabupaten Gunungkidul. Analisis dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan penelitian dituangkan ke dalam tiga tema utama, yaitu pendampingan inovasi, strategi menjangkau kelompok rentan, dan tantangan penerapan prinsip *No One Left Behind*.

1. Inovasi Pendamping dalam Mewujudkan Desa Inklusif

Pendamping SLDI mengembangkan inovasi sosial yang responsif terhadap konteks lokal desa. Inovasi tersebut meliputi program adaptasi dengan potensi desa dan kearifan lokal, sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa pelaksanaan SLDI selalu disesuaikan dengan karakter dan potensi masing-masing desa, sehingga materi pembelajaran lebih mudah diterima dan diterapkan oleh warga. Contoh konkret inovasi berbasis ekonomi adalah pelatihan membatik bagi keluarga ODGJ untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Selain itu, pendamping juga berperan sebagai fasilitator teknis dengan membantu desa mencari pemateri pelatihan apabila desa mengalami kesulitan dalam menentukan sumber narasumber. Pada tingkat penguatan kapasitas, dilakukan *Training of Trainer (TOT)* kepada pengurus sebelum pelaksanaan sekolah lapang agar mereka memiliki pemahaman yang sama dan siap mendampingi warga secara efektif.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi inovasi penting dalam program SLDI, misalnya penggunaan aplikasi pre-test dan post-test untuk mentransmisikan pencapaian peserta secara partisipatif. Dari sisi kelembagaan, pendamping mengusulkan pengesahan pengurus SLDI

melalui SK Lurah guna memastikan program berlanjut meskipun pendamping sudah tidak aktif di desa tersebut. Inovasi lain yang menarik adalah penerapan sistem rotasi kelas antar desa setiap bulan untuk menciptakan ekosistem belajar lintas wilayah dan memperkuat kolaborasi antar desa. Pendamping juga memanfaatkan tradisi budaya seperti pasrah manten dan laden hajatan sebagai sarana edukasi inklusi dan pemberdayaan, menunjukkan bahwa inovasi budaya dapat menjadi pintu masuk strategi dalam membumikan nilai-nilai inklusi.

2. Strategi Pendamping dalam Menjangkau Kelompok Rentan

Pendamping SLDI menggunakan strategi yang bersifat relasional, adaptif, dan transformatif untuk menjangkau kelompok rentan. Pendekatan jemput bola menjadi strategi utama untuk memastikan kehadiran penyandang disabilitas dalam kegiatan sekolah lapang. Hal ini menghilangkan hambatan mobilitas yang selama ini membatasi akses kelompok rentan terhadap ruang publik. Selain itu, pendamping membantu kelompok rentan, khususnya ODGJ, dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, sehingga mereka dapat mengakses layanan dasar dan bantuan sosial. Pendekatan psikososial diterapkan dengan membentuk kelompok diskusi kecil, menciptakan ruang aman bagi warga rentan untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya tanpa merasa takut atau malu.

Pendamping juga memfasilitasi permintaan pelatihan public speaking dari desa, yang menunjukkan kesadaran baru perangkat desa akan pentingnya suara kelompok rentan dalam forum-forum publik. Strategi kolaborasi lintas sektor dijalankan dengan merangkul kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, puskesmas, polsek, dan lembaga lain, untuk memperkuat perlindungan dan layanan bagi kelompok rentan. Di sisi lain, penggunaan media komunikasi informal seperti grup WhatsApp desa menjadi strategi untuk menjaga hubungan sosial dan mempermudah koordinasi kegiatan inklusi. Namun, terdapat keterbatasan adaptif karena pendamping lebih fokus pada penyandang disabilitas tuna daksa dibandingkan tuna rungu akibat kendala komunikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun strategi telah adaptif, terdapat munculnya risiko eksklusi baru jika kapasitas pendamping belum mampu menjangkau semua jenis disabilitas. Terdapat pula indikasi tumbuhnya partisipasi sosial warga, seperti adanya warga yang secara sukarela mengantarkan obat bagi ODGJ karena keluarga mereka tidak memiliki kendaraan. Selain itu, Dusun Ploso di Kalurahan Petir menunjukkan praktik inklusi alami, dimana masyarakat telah terbiasa berinteraksi dengan ODGJ tanpa stigma atau diskriminasi.

3. Tantangan Implementasi Prinsip No One Left Behind

Dalam pelaksanaan program SLDI, pendamping menghadapi tantangan multidimensi. Tantangan struktural muncul dari sistem reimbursement pendanaan yang tidak fleksibel, sehingga menyulitkan pendamping dan desa dalam melaksanakan kegiatan secara efektif. Ketidakpastian pencairan dana dari pemerintah pusat juga berdampak pada menurunnya semangat desa dalam mengimplementasikan program inklusi. Rendahnya kapasitas SDM desa menjadi tantangan lain di mana masih sulit menemukan perangkat desa yang memiliki kompetensi untuk mengelola program inklusi secara mandiri. Minimnya inisiatif administratif perangkat desa, misalnya dalam penyusunan template kegiatan, juga menghambat efektivitas program.

Tantangan budaya muncul dari rendahnya pemahaman konsep inklusi oleh perangkat desa. Prinsip inklusi masih dipahami secara sempit sebagai program bantuan sosial, belum diinternalisasi sebagai pendekatan pembangunan berbasis keadilan sosial dan hak asasi manusia. Hambatan teknis juga ditemukan, seperti aksesibilitas fisik yang terbatas sehingga difabel dan ibu-ibu sulit hadir tanpa dijemput, serta koordinasi lintas sektor yang masih bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam sistem perencanaan desa.

Kelompok rentan juga menghadapi keterbatasan dalam pemasaran produk secara digital akibat rendahnya literasi teknologi. Selain itu, belum adanya peta kebutuhan inklusi di tingkat dusun menghambat pendamping dalam menyusun intervensi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pendamping SLDI memiliki peran strategis sebagai fasilitator, inovator, dan penghubung berbagai aktor dalam pembangunan desa inklusi. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang afirmatif dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa, inovasi dan strategi pendampingan berisiko hanya menjadi praktik baik sementara yang sulit diinstitusionalisasikan dalam tata kelola pembangunan desa secara berkelanjutan.

Pembahasan

Peran pendamping SLDI sebagai inovator sosial lokal terwujud melalui serangkaian strategi yang lahir dari pemahaman mendalam terhadap konteks lapangan. Praktik seperti "jemput bola" untuk menjangkau warga yang terisolasi, baik secara geografis maupun sosial, merupakan respons langsung terhadap kegagalan sistem formal dalam memberikan pelayanan yang merata. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa inovasi sosial seringkali muncul dari "kekosongan sistemik, di mana kebutuhan nyata komunitas tidak terjawab oleh institusi yang ada" (Herawati et al., 2022). Dengan proaktif mendatangi penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), pendamping tidak hanya memberikan bantuan administratif, tetapi juga membangun hubungan kepercayaan yang menjadi fondasi bagi intervensi lebih lanjut. Inovasi ini bukan sekadar program, melainkan sebuah pergeseran paradigma dari menunggu menjadi melayani secara aktif.

Proses adopsi inovasi ini secara cermat mengikuti tahapan difusi yang diidentifikasi oleh Rogers. Tahap pertama, *pengetahuan*, dimulai ketika pendamping memperkenalkan realitas kehidupan kelompok rentan kepada aparat desa dan masyarakat luas, seringkali melalui data dan cerita personal yang menggugah. Tahap kedua, *persuasi*, dilakukan melalui dialog-dialog personal dan kelompok kecil yang intensif, di mana pendamping memfasilitasi diskusi untuk mengubah persepsi dan membangun empati. Tahap ketiga, *keputusan dan implementasi*, diwujudkan dalam bentuk strategi konkret seperti fasilitasi administrasi kependudukan atau pengintegrasian nilai inklusi ke dalam acara tradisi lokal. Sebagaimana dicatat oleh MDPI (2023), "Proses difusi inovasi inklusif di tingkat desa tidak bersifat linear, melainkan sebuah siklus dialogis yang membutuhkan konfirmasi terus-menerus melalui partisipasi aktif warga." Keterlibatan warga dalam setiap tahap memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan benar-benar relevan dan berkelanjutan.

Lebih jauh, inovasi yang dikembangkan tidak hanya bersifat programatik tetapi juga kelembagaan. Penyelenggaraan *Training of Trainers* (TOT) dan mekanisme rotasi pembelajaran antardesa menciptakan jaringan pengetahuan yang terdistribusi dan berkelanjutan. Model ini mencerminkan konsep pembelajaran sosial horizontal, di mana pengetahuan tidak lagi terpusat pada satu ahli, melainkan menyebar dan berkembang melalui interaksi antar-rekan. Menurut Wiley (2024), "Inovasi yang terdistribusi memungkinkan komunitas untuk membangun kapasitas kolektif, mengurangi ketergantungan pada intervensi eksternal dan menumbuhkan ketahanan dari dalam." Dengan demikian, pendamping tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga menanamkan fondasi bagi desa untuk terus belajar dan beradaptasi secara mandiri di masa depan, menciptakan ekosistem inovasi yang hidup.

Pendekatan yang digunakan oleh para pendamping secara mendalam mengadopsi prinsip pedagogi pembebasan yang dipopulerkan oleh Paulo Freire. Mereka secara sadar memposisikan diri sebagai "teman seperjuangan" bukan sebagai "guru" atau ahli yang serba

tahu. Relasi kuasa yang hierarkis sengaja didobrak untuk menciptakan ruang dialog yang setara dan aman. Dalam diskusi-diskusi informal di beranda rumah atau balai dusun, kelompok rentan didorong untuk menyuarakan pengalaman, ketakutan, dan harapan mereka tanpa merasa dihakimi atau direndahkan. Seperti yang ditekankan dalam JISEM (2025), "Pembebasan sejati hanya terjadi ketika kaum tertindas, dalam hal ini kelompok rentan, diberi ruang untuk menamai dunia mereka sendiri, mendefinisikan masalah mereka, dan merumuskan solusi mereka sendiri." Pendekatan dialogis ini menjadi kunci untuk membuka partisipasi otentik dari mereka yang selama ini paling sering dibungkam oleh struktur sosial.

Strategi pemberdayaan ini juga selaras dengan teori pemberdayaan komunitas dari Robert Chambers, yang menekankan pentingnya membalikkan logika intervensi dari atas ke bawah (*top-down*). Alih-alih datang dengan solusi yang telah dirancang sebelumnya, pendamping memprioritaskan penggalian pengetahuan lokal dan pemahaman mendalam atas kebutuhan yang dirasakan langsung oleh warga (Marbi & Widayat, 2025; Muryani & Sugiyanto, 2025). Mereka bertindak sebagai fasilitator yang membantu komunitas mengenali aset, kekuatan, dan kearifan yang sudah mereka miliki. Rasyid et al. (2025) menyatakan bahwa "intervensi pembangunan yang paling berkelanjutan adalah yang mampu memperkuat kapasitas lokal, bukan menggantikannya dengan keahlian eksternal." Dengan demikian, pendampingan tidak menciptakan ketergantungan baru, melainkan memperkuat kemandirian komunitas untuk mengelola tantangan mereka sendiri, memastikan bahwa solusi yang lahir benar-benar berakar pada konteks lokal.

Penerapan sensitivitas interseksional, sebagaimana digagas oleh Kimberlé Crenshaw, menjadi pilar ketiga dalam strategi penjangkauan. Pendamping menyadari bahwa pengalaman kerentanan tidaklah tunggal, melainkan dibentuk oleh persilangan berbagai identitas seperti gender, status ekonomi, usia, dan kondisi disabilitas. Seorang perempuan lansia miskin dengan disabilitas akan menghadapi lapisan diskriminasi yang berbeda dari seorang pemuda dengan disabilitas dari keluarga yang lebih mampu. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan bersifat sangat fleksibel dan personal. "Kebijakan 'satu ukuran untuk semua' secara inheren bersifat eksklusif karena ia mengabaikan kompleksitas identitas dan pengalaman hidup individu yang berlapis," (Rasyid et al., 2025). Fleksibilitas ini memungkinkan pendamping untuk merancang intervensi yang benar-benar relevan dan efektif, menghindari generalisasi yang berisiko melanggengkan eksklusi.

Salah satu tantangan paling signifikan dalam mewujudkan desa inklusif terletak pada level struktural, terutama terkait mekanisme birokrasi dan alokasi anggaran desa. Prosedur *reimbursement* yang kaku dan skema pembiayaan yang tidak fleksibel seringkali menjadi penghalang utama bagi implementasi program inklusif yang bersifat responsif dan mendesak. Kondisi ini melahirkan apa yang disebut sebagai eksklusif administratif, di mana warga rentan yang paling membutuhkan justru terhalang oleh aturan teknokratis yang rumit. Fenomena ini mencerminkan kritik Foucault tentang bagaimana "prosedur administratif yang kaku menjadi bentuk kekuasaan senyap yang, atas nama objektivitas, secara efektif menentukan siapa yang layak dan tidak layak mendapatkan dukungan," (MDPI, 2023). Keterbatasan ini, dari perspektif kapabilitas Amartya Sen, secara langsung menghambat kemampuan warga untuk mencapai kehidupan yang mereka anggap bermakna, karena kebebasan substantif mereka dibatasi oleh struktur yang tidak adil (Wiley, 2024).

Pada level kultural, tantangan yang dihadapi tidak kalah berat. Meskipun desa memiliki modal sosial yang kuat dalam bentuk gotong royong dan solidaritas, pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai inklusi seringkali masih dangkal. Inklusi kerap disalahartikan sebatas pemberian bantuan karitatif, bukan sebagai upaya sistematis untuk menjamin hak dan partisipasi penuh bagi semua warga. Kepercayaan dan jejaring sosial yang ada, jika tidak

dibarengi dengan kesadaran inklusif, justru dapat memperkuat norma-norma yang eksklusif (Ernawati et al., 2025; Natalia & Supardal, 2025; Ulfa & Frinaldi, 2025). Wiley (2024) mengingatkan bahwa "modal sosial dapat menjadi pedang bermata dua; ia mampu membangun jembatan, namun juga dapat menebalkan dinding jika hanya berputar di antara kelompok dominan." Tanpa upaya internalisasi nilai inklusi secara terus-menerus, partisipasi yang diharapkan hanya akan bersifat seremonial, bukan partisipasi bermakna yang didasari oleh pengakuan atas kesetaraan hak.

Secara teknis, integrasi tata kelola inklusif dihadapkan pada berbagai kendala infrastruktur dan kapasitas. Masalah akurasi dan ketersediaan data terpilah mengenai kelompok rentan menjadi problem mendasar yang menghambat perencanaan berbasis bukti. Tanpa data yang valid, pemerintah desa kesulitan mengidentifikasi sasaran, mengalokasikan sumber daya secara tepat, dan mengukur dampak intervensi. Selain itu, kesenjangan literasi digital di antara aparat desa dan warga, ditambah dengan infrastruktur teknologi yang belum merata, menjadi penghalang dalam pemanfaatan sistem informasi desa untuk mendukung tata kelola yang transparan dan partisipatif (MDPI, 2023; Wiley, 2024). Hambatan teknis ini, meskipun terlihat operasional, memiliki dampak strategis karena melemahkan fondasi yang diperlukan untuk membangun sistem pemerintahan desa yang modern dan inklusif secara menyeluruh.

Kerangka transformasi menuju desa inklusif harus ditunen dari tiga pilar utama yang saling menguatkan. Pilar pertama adalah pelebagaan inovasi sosial budaya lokal yang digerakkan oleh pemberdayaan dialogis. Strategi seperti jemput bola, adaptasi nilai inklusi ke dalam tradisi, dan fasilitasi administrasi yang responsif perlu distandarisasi sebagai model praktik terbaik. Proses ini, yang memadukan difusi inovasi ala Rogers dengan pembelajaran horizontal ala Van de Ven, memastikan bahwa solusi yang dikembangkan tidak hanya efektif tetapi juga berakar kuat dalam konteks lokal (MDPI, 2023; Wiley, 2024). Pemberdayaan dialogis ala Freire dan penguatan kapasitas lokal ala Chambers menjadi mesin penggerakannya, memastikan bahwa inovasi terus-menerus dibentuk oleh suara dan kebutuhan otentik dari kelompok yang paling terpinggirkan (JISEM, 2025; Rasyid et al., 2025).

Pilar kedua adalah menggeser tujuan akhir dari sekadar penyediaan layanan menjadi perwujudan keadilan sebagai kapabilitas nyata. Kerangka ini menuntut agar setiap kebijakan dan program desa dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kebebasan substantif warga, khususnya mereka yang paling rentan. Sejalan dengan prinsip keadilan dari Sen dan Rawls, fokusnya adalah pada "pembongkaran hambatan dan perluasan kebebasan individu untuk memilih dan menjalani kehidupan yang mereka hargai," (Wiley, 2024). Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pilar ketiga, yaitu pelebagaan tata kelola kolaboratif. Model ini, seperti yang diusulkan oleh Ansell & Gash, meniscayakan kemitraan aktif antara pemerintah desa, puskesmas, dinas sosial, organisasi penyandang disabilitas, dan elemen masyarakat sipil lainnya. Kolaborasi ini menciptakan mekanisme akuntabilitas bersama dan memastikan bahwa sumber daya dari berbagai sektor dapat dikoordinasikan secara efektif untuk mendukung inklusi.

Kerangka transformatif untuk desa inklusif tidak akan pernah terwujud sebagai sebuah sistem yang berfungsi tanpa adanya kemauan politik yang kuat untuk menghadapi berbagai hambatan secara langsung. Kemauan ini harus diterjemahkan menjadi kebijakan afirmatif yang konkret di tingkat supra-desa, seperti kabupaten dan provinsi, yang secara aktif membongkar kekakuan birokrasi dan anggaran. Sebagai contoh, perlu ada regulasi yang menyederhanakan mekanisme pencairan dana untuk program-program yang bersifat responsif terhadap kebutuhan mendesak kelompok rentan, serta alokasi anggaran khusus yang dijamin dalam APBDes untuk kegiatan inklusif. Lebih dari itu, pemerintah di tingkat yang lebih tinggi dapat merancang skema insentif, baik dalam bentuk penghargaan maupun dana perbantuan, bagi desa-desa yang

menunjukkan komitmen dan kemajuan nyata dalam praktik inklusi. Langkah-langkah struktural ini menjadi fondasi yang memungkinkan inovasi di tingkat akar rumput untuk tumbuh dan berkelanjutan, bukan layu karena terbentur tembok regulasi yang tidak fleksibel (Natalia & Supardal, 2025).

Selaras dengan reformasi kebijakan, upaya peningkatan kapasitas teknis dan kultural harus menjadi prioritas ganda yang berjalan beriringan. Penguatan kapasitas teknis, terutama dalam hal pengelolaan data terpilah dan peningkatan literasi digital bagi aparat desa serta kader komunitas, adalah hal yang mutlak diperlukan. Data yang akurat menjadi kompas bagi perencanaan berbasis bukti, sementara literasi digital membuka pintu menuju tata kelola yang lebih transparan dan partisipatif. Namun, perangkat keras teknis ini tidak akan bermakna tanpa "perangkat lunak" budaya yang mendukung. Oleh karena itu, kampanye sistematis untuk menanamkan nilai-nilai inklusi secara mendalam di tengah masyarakat menjadi sangat krusial. Upaya ini harus melampaui sosialisasi formal dan merangkul tokoh agama, tokoh adat, serta media lokal untuk mengubah paradigma dari belas kasihan (*charity*) menjadi pemenuhan hak (*rights-based*), memastikan bahwa inklusi dipahami sebagai tanggung jawab kolektif (Ohal & Supardal, 2025; Tamrin et al., 2024).

Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh intervensi ini adalah untuk mentransformasikan inovasi-inovasi inklusif yang awalnya lahir dari inisiatif pendampingan agar tidak lagi berstatus sebagai proyek temporer. Keberhasilan jangka panjang diukur dari sejauh mana praktik-praktik baik ini terintegrasi secara permanen ke dalam DNA perencanaan dan implementasi pembangunan desa. Ini berarti prinsip inklusi harus menjadi lensa yang digunakan dalam setiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), tercermin dalam setiap dokumen RKPDes dan RPJMDes, dan menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, inklusi tidak lagi menjadi sebuah program tambahan, melainkan menjadi cara kerja fundamental pemerintah desa. Hanya dengan pelembagaan yang sistematis inilah prinsip *No One Left Behind* dapat beralih dari sekadar slogan menjadi kenyataan yang hidup dan dirasakan oleh setiap warga desa (Natalia & Supardal, 2025; Tamrin et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa pendamping Sekolah Lapang Desa Inklusif (SLDI) memainkan peran yang melampaui tugas fasilitasi administratif semata. Inovasi yang dikembangkan pendamping bukan sekadar improvisasi teknis, melainkan lahir sebagai gerakan sosial berbasis empati, keberpihakan, dan pemahaman kontekstual terhadap kerentanan warga. Inovasi tersebut mencakup dimensi administratif, pedagogis, sosial, budaya, hingga kelembagaan, yang menjadikan ruang-ruang sosial dan tradisi lokal sebagai media transformasi inklusi yang humanis dan etis. Strategi pemberdayaan yang digunakan bersifat relasional, kontekstual, dan transformatif. Pendamping membangun kepercayaan melalui interaksi informal dan pendekatan personal yang intensif, menciptakan ruang aman bagi partisipasi warga rentan, serta mengintegrasikan kerja inklusi ke dalam sistem perencanaan dan tata kelola desa melalui advokasi dan kolaborasi lintas sektor. Strategi ini sejalan dengan prinsip pedagogi pembiayaan dan pemberdayaan berbasis pengetahuan lokal.

Namun demikian, pelaksanaan prinsip *No One Left Behind* di tingkat desa masih menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan anggaran fleksibel dan rendahnya kapasitas kelembagaan desa; tantangan kultural berupa norma sosial eksklusif dan dominasi elite desa; serta tantangan teknis seperti minimnya dukungan digital, terbatasnya aksesibilitas fisik, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Kondisi ini menuntut keberanian, kreativitas, dan daya tahan pendamping sosial dalam bekerja di tengah sistem yang belum sepenuhnya inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendamping SLDI berperan sebagai aktor mikro-politik yang menjembatani kelompok menuju ruang pengambilan keputusan desa, sekaligus menantang struktur ketidakadilan melalui kerja-kerja akar rumput yang terstruktur, reflektif, dan berdampak nyata. Prinsip *No One Left Behind* bukan sekedar jargon, melainkan telah dijalankan secara konkret melalui praktik inklusi sehari-hari di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bappenas. (2022). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- BPS Gunungkidul. (2023). *Gunungkidul dalam angka 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm. *World Development*, 22(10), 1437–1454. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90030-2](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90030-2)
- Ernawati, E., et al. (2025). Evaluasi model CIPP pada program pendidikan inklusif di SD. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 509. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i2.4869>
- Harian Jogja. (2022, 30 November). *Jumlah penyandang disabilitas di Gunungkidul meningkat*. Harianjogja.com. <https://harianjogja.com>
- Harian Jogja. (2024, 15 April). *Rasio dokter Gunungkidul masih rendah dibandingkan standar WHO*. Harianjogja.com. <https://harianjogja.com>
- Lekobane, K. R., & Ton, G. (2024). Does social protection reach those left behind: Empirical evidence from Botswana using multidimensional poverty approaches. *Journal of Development Effectiveness*, 1. <https://doi.org/10.1080/19439342.2024.2355635>
- Marbi, S., & Widayat, T. N. E. (2025). Kapasitas kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 680. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6200>
- Mulgan, G. (2006). The process of social innovation. *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, 1(2), 145–162. <https://doi.org/10.1162/itgg.2006.1.2.145>
- Muryani, L., & Sugiyanto, S. (2025). Refleksi Gandeng Gendong model pemberdayaan masyarakat di Kota Yogyakarta. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(4), 717. <https://doi.org/10.51878/social.v4i4.4515>
- Natalia, N., & Supardal, S. (2025). Kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera (Studi kasus di Desa Semantun Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat). *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 569. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5742>
- Ohal, G. R., & Supardal, S. (2025). Dinamika peran tokoh non-struktur dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di Desa Umamanu. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 703. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6197>
- Purnomo, M., et al. (2021). Strategy for empowering the City of Surabaya as a disability-friendly and elderly friendly city. *Proceedings of the International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211223.113>

- Setyawan, F., & Sumarto, R. H. (2025). Tantangan dan peluang pembangunan wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi di Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 550. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5734>
- Srivastava, A. K. (2017). Segregated data of urban poor for inclusive urban planning in India. *SAGE Open*, 7(1). <https://doi.org/10.1177/2158244016689377>
- Tamrin, U., et al. (2024). Penerapan good governance di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i1.2709>
- Tsabita, R., & Sugandi, M. S. (2022). Analisis kesenjangan kepuasan dalam pemanfaatan situs layanan kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(3), 321. <https://doi.org/10.31315/jik.v19i3.4228>
- Ulfa, S. N., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan publik dan pelayanan publik. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 610. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5965>
- UN DESA. (2016). *Leaving no one behind: The imperative of inclusive development*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Van de Ven, A. H. (2022). *The innovation journey: Creating something new*. Oxford University Press.
- Widayanti, F. D., et al. (2025). Analisis kesulitan belajar matematika pada siswa kelas V MI Wahid Hasyim. *Science: Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika dan IPA*, 5(2), 580. <https://doi.org/10.51878/science.v5i2.5145>